

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan. Sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Daerah berkewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Keuangan daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang berakibat pada meningkatnya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan setiap tahun pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan, dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011-2015 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-Tata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)					RATA - RATA PERTUMB UHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015*	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN	858,236,946,103	958,677,538,873	1,061,397,988,848	1,260,505,396,064	1,426,596,968,333	13.6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	48,359,915,661	57,298,239,683	62,988,926,126	101,276,945,022	126,449,078,417	28.5
1.1.1	Pajak Daerah	6,006,625,272	7,954,645,819	9,053,156,097	20,684,068,973	21,789,927,222	45.0
1.1.2	Retribusi Daerah	11,626,055,798	14,033,372,250	18,399,845,514	20,455,509,921	20,411,292,110	15.7
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,903,227,692	3,139,175,330	2,259,920,570	2,333,710,205	2,421,047,544	-3.2
1.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27,824,006,899	32,171,046,283	33,276,003,947	57,803,655,923	81,826,811,541	33.6
1.2	Dana Perimbangan	583,216,975,459	703,480,864,661	756,837,409,646	808,252,090,951	863,523,504,816	10.5
1.2.1	Dana Bagi hasil Pajak /bagi hasil bukan Pajak	48,580,538,459	61,926,220,661	57,606,486,646	55,639,206,951	53,312,201,816	3.2
1.2.2	Dana Alokasi Umum	480,580,537,000	589,829,914,000	647,293,403,000	700,743,024,000	714,847,233,000	10.7
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	54,055,900,000	51,724,730,000	51,937,520,000	51,869,860,000	95,364,070,000	20.0
1.3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	226,660,054,983	197,898,434,529	241,571,653,076	350,976,360,091	436,624,385,100	19.8
1.3.1	Hibah	986,005,745	842,483,627	1,925,000	2,100,000	1,050,000	-38.8
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan dari Pemda Lainnya	29,581,537,578	27,659,934,902	34,123,870,076	63,881,618,091	60,742,249,100	24.8
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Khusus	175,238,937,160	145,874,996,000	172,525,413,000	182,420,105,000	281,230,973,000	15.4
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi Pemerintah lainnya	20,853,574,500	23,521,020,000	34,920,445,000	104,672,537,000	94,650,113,000	62.9

Sumber: DPPKA, Kabupaten Pacitan 2011-2015

Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat yaitu periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 13,6%.

Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung meningkat dari periode tahun 2011-2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,5%, yang secara persentase pertumbuhan masing-masing komponen PAD berbeda-beda.

Sumber utama pendapatan Kabupaten Pacitan berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum. Dana Perimbangan Kabupaten Pacitan setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2011-2015 terakhir sebesar 10,5%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 20%, Selain dari PAD dan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata-rata pertumbuhan 19,8%.

b) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah tahun 2011-2015, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	REALISASI					RATA - RATA PERTUMBU HAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015*	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA	847,653,577,678	964,961,884,990	1,036,980,098,890	1,202,651,576,766	1,408,458,278,765	13.6
2.1	Belanja Tidak Langsung	570,148,800,482	656,008,622,770	724,455,198,735	804,818,701,450	921,154,743,893	12.8
2.1.1	Belanja Pegawai	497,212,770,319	562,704,319,406	607,673,757,744	667,847,218,506	675,833,545,402	8.1
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Dana Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	7,773,449,671	8,542,808,231	24,769,472,900	25,308,799,701	31,487,862,975	56.6
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11,519,575,625	16,163,946,000	4,544,127,410	6,617,811,731	6,480,899,867	3.0
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,862,551,917	2,736,168,297	3,300,666,461	3,376,507,901	3,655,296,219	6.7
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	47,210,287,150	65,097,837,035	82,534,550,520	100,542,199,110	203,123,076,430	47.1
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,570,165,800	763,543,800	1,632,623,700	1,126,164,500	574,063,000	-11.2

NO	URAIAN	REALISASI					RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015*	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Belanja Langsung	277,504,777,196	308,953,262,221	312,524,900,155	397,832,875,316	487,303,534,872	15.6
2.2.1	Belanja Pegawai	26,501,880,289	33,986,089,151	36,427,365,750	35,969,228,877	44,415,456,398	14.4
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106,747,844,724	121,427,491,610	143,242,808,806	161,434,465,274	174,736,431,037	13.2
2.2.3	Belanja Modal	144,255,052,183	153,539,681,459	132,854,725,599	200,429,181,165	268,151,647,437	19.4

Sumber: DPPKA, Kabupaten Pacitan 2011-2015

Berdasarkan tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2011-2015 bahwa realisasi belanja mengalami pertumbuhan rata rata sebesar 13,6%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,8%. Belanja Tidak Langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,1%. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi sebesar 15,6%. Komponen Belanja Langsung terbesar digunakan untuk belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,4%.

c) Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Pacitan terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel 3.3 berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Pacitan.

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)					RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PEMBIAYAAN	46,363,870,122	54,723,738,547	47,316,292,447	71,371,982,405	128,275,801,703	33.8
3.1	Penerimaan Pembiayaan	49,363,870,122	57,223,738,547	48,768,292,447	72,121,982,405	129,225,801,703	32.1
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	49,040,415,122	56,947,238,547	48,439,392,447	71,734,182,405	129,225,801,703	32.4
3.1.2	Penerimaan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	323,455,000	276,500,000	328,900,000	387,800,000	-	-19.4
							-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000	2,500,000,000	1,452,000,000	750,000,000	950,000,000	-20.1
3.2.1	Pembentukan Dana	-	-	-	-	-	-



NO	URAIAN	REALISASI (Rp)					RATA - RATA PERTUMBUH AN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cadangan						
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	2,750,000,000	2,250,000,000	1,452,000,000	750,000,000	950,000,000.00	-18.8
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	250,000,000	250,000,000	-	-	-	-

Sumber: DPPKA, Kabupaten Pacitan 2011-2015

Memperhatikan Tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan mengalami kenaikan rata rata sebesar 33,8%, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 32,1%. Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata penurunan sebesar -20,1%. Komponen Pengeluaran Pembiayaan yang penurunannya signifikan dari penyertaan modal dengan rata-rata penurunan sebesar 18,8%.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu *entitas* pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Pacitan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, serta analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dapat disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

U R A I A N	TAHUN (Rp)					RATA - RATA PERTUMB UHAN (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
ASET	1,653,062,450,817	1,638,738,722,308	1,548,126,482,775	1,752,626,886,071	1,858,482,700,749	3.21
ASET LANCAR	68,128,048,694	65,335,004,027	95,167,981,968	150,611,820,944	180,782,642,221	29.96
KAS	56,947,238,547	48,439,392,447	71,734,182,405	129,225,801,703	130,227,114,176	28.52
Piutang	3,154,719,856	6,902,184,465	14,710,036,606	12,080,607,498	26,417,042,204	83.18
Penyisihan Piutang	-	(247,934,122)	(357,483,634)	(1,244,595,619)	(2,197,317,935)	19.14
Persediaan	8,026,090,291	9,874,843,356	8,723,762,957	9,305,411,743	7,943,469,848	0.85
INVESTASI JANGKA PANJANG	18,365,716,547	22,982,895,932	23,815,534,538	24,823,801,925	25,666,828,926	9.10
Investasi Non Permanen	7,477,333,800	7,155,279,486	7,282,136,010	7,913,822,896		-23.46
Investasi Non Permanen Lainnya	7,477,333,800	7,827,333,800	8,099,133,800	8,449,133,800	8,799,133,800	4.15
Dana Bergulir	-	(672,054,314)	(816,997,790)	(535,310,904)	(639,465,465)	4.86
Investasi Permanen	10,888,382,747	15,827,616,446	16,533,398,528	16,909,979,029	17,507,160,592	13.91
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10,888,382,747	15,827,616,446	16,533,398,528	16,909,979,029	17,507,160,592	13.91
ASET TETAP	1,522,483,663,599	1,531,491,787,031	1,393,875,086,735	1,539,966,862,920	1,618,792,568,770	1.80
Tanah	432,121,459,483	477,538,791,151	465,613,335,690	464,008,995,264	459,992,974,889	1.70
Peralatan dan Mesin	173,576,532,899	205,103,308,872	237,453,300,118	273,145,128,219	317,117,388,282	16.27
Gedung dan Bangunan	331,492,774,218	395,092,460,497	443,474,263,768	575,481,185,124	658,478,379,572	18.91
Jalan Jaringan dan Irigasi	538,987,772,094	581,353,991,888	639,400,016,080	749,083,668,790	907,837,093,710	14.05



U R A I A N	TAHUN (Rp)					RATA - RATA PERTUMB UHAN (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Aset Tetap Lainnya	31,385,551,056	36,216,123,666	39,733,285,747	45,765,990,136	48,141,963,685	11.37
Konstruksi dalam Pengerjaan	14,919,573,850	4,274,374,905	10,382,389,233	11,111,431,879	5,514,630,780	7.05
Akumulasi Penyusutan		(168,087,263,949)	(442,181,503,902)	(578,629,536,493)	(778,289,862,149)	8.63
Akumulasi Penyusutan		(168,087,263,949)	(442,181,503,902)	(578,629,536,493)		-25.00
ASET LAINYA	44,085,021,977	18,929,035,319	35,267,879,535	37,224,400,282	33,240,660,831	6.02
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	42,168,609,800	2,306,810,800	25,453,277,700	25,453,277,700	25,453,277,700	227.22
Aset Tidak Berwujud	876,500,000	1,430,610,065	1,430,610,065	1,779,827,765	2,244,930,240	28.44
Aset lain - lain	1,039,912,177	13,416,158,549	8,383,991,770	9,991,294,817	7,102,421,634	285.72
Dana yang dibatasi Penggunaanya	-	1,775,455,905				
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud					(1,559,968,743)	
JUMLAH ASET	1,548,126,482,775	1,638,738,722,308	1,548,126,482,775	1,752,626,886,071	1,858,482,700,749	1.51
KEWAJIBAN	1,020,066,792	1,660,971,118	1,397,676,555	1,065,572,011	4,026,565,028	75.27
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,020,066,792	1,660,971,118	1,397,676,555	1,065,572,011	4,026,565,028	75.27
Pendapatan diterima dimuka	229,300,000	229,300,000	229,300,000	229,300,000	569,271,404	37.07
Utang Jangka Pendek	790,766,792	1,431,671,118	1,168,376,555	836,272,011		-16.44
JUMLAH KEWAJIBAN	1,020,066,792	1,660,971,118	1,397,676,555	1,065,572,011	4,026,565,028	75.27
EKUITAS DANA	1,652,042,384,025	1,637,077,751,190	1,546,728,806,220	1,751,561,314,060	1,854,456,135,721	3.17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,653,062,450,817	1,638,738,722,308	1,548,126,482,775	1,752,626,886,071	1,858,482,700,749	3.21

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Pacitan 2011-2015

a) Aset

Aset pemerintah daerah Kabupaten Pacitan selama periode tahun 2011-2015 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,21%. Aset lancar pemerintah Kabupaten Pacitan mengalami tren pertumbuhan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan rata-rata kenaikan sebesar 29,96%. Kas mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2011 sebesar Rp.56.947.238.547 dan sebesar Rp.130.227.114.176 di periode tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,52%. Investasi jangka panjang pemerintah Kabupaten Pacitan mengalami *trend* pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 9,1%, total aset tetap Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 adalah Rp.1.522.483.663.599 dan meningkat menjadi Rp.1.618.792.568.770 di tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar 1,51%.

b) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Pacitan selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan dengan rata-rata 75,27%, yaitu di tahun 2011 kewajiban jangka pendek sebesar Rp.1.020.066.792 dan di periode tahun 2015 kewajiban jangka pendek sebesar Rp.4.026.565.028

c) Ekuitas Dana

Perkembangan *ekuitas* dana Kabupaten Pacitan selama tahun 2011-2015 tumbuh rata-rata sebesar 3,17%, dimana pada tahun 2011 sebesar Rp.1.652.042.384.025 dan tahun 2015 sebesar Rp.1.854.456.135.721

Berdasarkan dari neraca Kabupaten Pacitan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, maka hasil analisa perhitungan rasio *likuiditas* dan rasio *solvabilitas*, dapat disajikan sebagaimana Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Rasio Likuiditas					
1.	Rasio lancar (current ratio)	66.8	39.3	68.1	141.3	44.9
2.	Rasio quick (quick ratio)	58.9	33.4	61.8	132.6	42.9
B	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0.062	0.101	0.090	0.061	0.0022
2	Rasio hutang terhadap modal	0.0617	0.1015	0.0904	0.0608	0.00217

Berdasarkan Tabel 3.5 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio *likuiditas* dan *solvabilitas* yang positif.

A. Rasio Likuiditas

Rasio *likuiditas* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio *likuiditas* yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Pacitan yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar yang merupakan ukuran paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek.

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2011 adalah sebesar 66,8 dan tahun 2015 sebesar 44,9. Hal ini berarti menunjukkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kemampuan membayar hutang pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 44 kali lebih.

2. Quick Rasio

Quick rasio digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan *quick* rasio dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang *likuiditasnya* rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi *likuiditas*. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling *likuid* mampu

menutupi hutang lancar. *Quick* rasio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih *likuid*. Berdasarkan tabel diatas, *quick* rasio pada tahun 2011 sebesar 58,9 serta periode tahun 2015 *quick* rasio sebesar 42,9 hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Pacitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio *solvabilitas* terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2011 sebesar 0,062 dan pada tahun 2015 sebesar 0,0022. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2011 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 0,0617 serta periode tahun 2015 sebesar 0,00217. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Pacitan, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang terpetakan akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dalam penyajian laporan keuangannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

A) Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun kontribusi terhadap pendapatan daerah masih cukup rendah dan terus diupayakan untuk ditingkatkan. Sumbangan terbesar berasal dari Dana Perimbangan, baik Bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN dan yang mempunyai kontribusi terhadap APBD Kabupaten Pacitan yang relatif besar. Pemanfaatan dana perimbangan menganut prinsip *money follows function* serta diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk menggali potensi ekonomi daerah serta mencapai prioritas nasional.

Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima pemerintah daerah termasuk Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, termasuk didalamnya adalah dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kabupaten Pacitan.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- e. Koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- f. Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan politik.

Sumber-sumber belanja daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang bisa dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah serta dengan terbitnya Undang-undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-undang tersebut telah diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, dengan harapan ketergantungan Kabupaten Pacitan dari dana pusat semakin berkurang yang artinya dapat lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah sebagai salah satu indikator kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan. Dalam rangka memenuhi target pendapatan daerah terus diupayakan agar semakin meningkat, berbagai upaya yang dilakukan antara lain:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan fasilitas dan keamanan terhadap obyek retribusi;
3. Sosialisasi dan promosi terhadap obyek pelayanan retribusi pada masyarakat;
4. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
5. Lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan serta meningkatkan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah;
6. Untuk dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah, terus diupayakan dalam bentuk koordinasi ke pusat, pengajuan proposal maupun surat sehingga dapat meningkatkan DAU, DAK dan Dana Insentif Daerah;
7. Menciptakan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi.

B) Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, pemenuhan SPM, pemenuhan SDGs, ketentuan *sharing* dari pusat maupun provinsi yang dituangkan pada program kegiatan baik pada Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung digunakan untuk membiayai urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Modal.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Hibah;
3. Belanja Bantuan Sosial;
4. Belanja Bagi Hasil;
5. Belanja Bantuan Keuangan;
6. Belanja Tidak Terduga.

Kebijakan perencanaan belanja langsung yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 meliputi :

1. Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD yang diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten baik, urusan wajib maupun urusan pilihan;
2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang benar-benar berdampak bagi masyarakat secara luas, termasuk investasi jangka panjang dibidang pendidikan;
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan kebijakan perencanaan belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 meliputi :

1. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Kebijakan belanja pegawai diprioritaskan pada gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil termasuk di dalamnya pemberian gaji ke 13 dan diproyeksikan ada penyesuaian gaji pokok PNS sebesar 6% sampai dengan 10%, sementara dalam perencanaan belanja pegawai diperhitungkan *accres* gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan tunjangan keluarga;
3. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
4. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
5. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten Pacitan kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan;
7. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.

C) Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan yang diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran. Sementara itu kegiatan investasi, baik investasi yang bersifat permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD maupun investasi non permanen dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan modal kerja. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran;
2. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan *likuiditas* keuangan daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Pacitan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pacitan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Pacitan, yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	2011			2012			2013			2014			2015			RATA - RATA
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
		Rp	Rp		Rp	Rp		Rp	Rp		Rp	Rp		Rp	Rp		
2.1	Belanja Tidak Langsung	583,072,765,827	570,148,800,482	97.8	674,545,396,897	656,008,622,770	97.3	773,453,795,429	724,455,198,735	93.7	867,500,566,124	804,818,701,450	92.8	1,043,151,586,439	921,154,743,893	88.3	94.0
2.1.1	Belanja Pegawai	506,826,605,259	497,212,770,319	98.1	578,457,293,697	562,704,319,406	97.3	653,082,680,244	607,673,757,744	93.0	725,550,962,660	667,847,218,506	92.0	785,576,121,320	675,833,545,402	86.0	93.3
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Dana Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	7,927,956,868	7,773,449,671	98.1	8,711,842,000	8,542,808,231	98.1	25,912,432,500	24,769,472,900	95.6	26,335,801,642	25,308,799,701	96.1	35,989,451,296	31,487,862,975	87.5	95.1
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11,775,430,000	11,519,575,625	97.8	16,734,274,000	16,163,946,000	96.6	5,816,223,535	4,544,127,410	78.1	8,462,084,376	6,617,811,731	78.2	7,558,843,816	6,480,899,867	85.7	87.3
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Propinsi /Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	3,006,913,700	2,862,551,917	95.2	2,953,430,200	2,736,168,297	92.6	3,615,549,150	3,300,666,461	91.3	3,673,273,446	3,376,507,901	91.9	4,401,653,442	3,655,296,219	83.0	90.8
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten en/ Kota dan Pemerintahan Desa	48,435,860,000	47,210,287,150	97.5	65,520,620,000	65,097,837,035	99.4	82,826,910,000	82,534,550,520	99.6	101,578,444,000	100,542,199,110	99.0	205,213,830,065	203,123,076,430	99.0	98.9
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,100,000,000	3,570,165,800	70.0	2,167,937,000	763,543,800	35.2	2,200,000,000	1,632,623,700	74.2	1,900,000,000	1,126,164,500	59.3	4,411,686,500	574,063,000	13.0	50.3
		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	583,072,765,827	570,148,800,482	97.8	674,545,396,897	656,008,622,770	97.3	773,453,795,429	724,455,198,735	93.7	867,500,566,124	804,818,701,450	92.8	1,043,151,586,439	921,154,743,893	88.3	94.0
		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
2.2	Belanja Langsung	306,137,284,332	277,504,777,196	90.6	321,238,171,748	308,953,262,221	96.2	325,184,153,535	312,524,900,155	96.1	416,820,198,858	397,832,875,316	95.4	498,292,606,313	487,303,534,872	97.8	95.2
2.2.1	Belanja Pegawai	27,271,317,905	26,501,880,289	97.2	34,904,577,000	33,986,089,151	97.4	38,463,893,567	36,427,365,750	94.7	36,588,711,500	35,969,228,877	98.3	43,795,679,100	44,415,456,398	101.4	97.8
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110,618,376,969	106,747,844,724	96.5	126,372,226,244	121,427,491,610	96.1	148,986,933,983	143,242,808,806	96.1	174,943,303,340	161,434,465,274	92.3	188,351,226,146	174,736,431,037	92.8	94.8
2.2.3	Belanja Modal	168,247,589,458	144,255,052,183	85.7	159,961,368,504	153,539,681,459	96.0	137,733,325,985	132,854,725,599	96.5	205,288,184,018	200,429,181,165	97.6	266,145,701,067	268,151,647,437	100.8	95.3
		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	306,137,284,332	277,504,777,196	90.6	321,238,171,748	308,953,262,221	96.2	325,184,153,535	312,524,900,155	96.1	416,820,198,858	397,832,875,316	95.4	498,292,606,313	487,303,534,872	97.8	95.2
		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015

Berdasarkan Tabel 3.6, dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat mengalami kenaikan periode tahun 2011 sebesar Rp.570.148.800.482 hingga pada tahun 2015 sebesar Rp.921.154.743.893, namun penyerapan Belanja Tidak Langsung dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan, rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggaran mencapai 94%. Belanja Langsung dari tahun 2011 sebesar Rp.277.504.777.196 atau 90,6% sampai dengan tahun 2015 besaran belanja langsung sebesar Rp.487.303.534.872 atau 97,8%, dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 95,2% atau lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung.

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Pacitan ditampilkan pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015
Kabupaten Pacitan

KODE	URAIAN	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.	BELANJA	752,430,525,680	828,429,659,384	845,879,055,553
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	605,938,226,247	666,613,158,843	674,241,352,867
5.1.1	Belanja Pegawai	605,938,226,247	666,613,158,843	674,241,352,867
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	598,354,363,747	660,141,808,843	667,145,897,867
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	5,315,862,500	4,287,350,000	4,693,175,000
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2,268,000,000	2,184,000,000	2,402,280,000
5.2	BELANJA LANGSUNG	146,492,299,433	161,816,500,541	171,637,702,686
5.2.1	Belanja Pegawai	35,279,233,250	35,966,853,877	44,415,456,398
5.2.1.01	Honorarium PNS	14,382,271,000	16,298,827,500	19,497,018,800
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,686,349,500	2,535,562,000	3,273,690,450
5.2.1.03	Uang Lembur	3,779,078,950	3,988,964,000	4,038,045,300
5.2.1.04	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	10,431,533,800	13,143,500,377	17,606,701,848
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98,915,708,331	109,224,418,451	107,827,899,101
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,727,527,514	10,228,994,862	11,580,062,028
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,884,382,566	32,178,441,261	36,726,472,646
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	83,500,000		
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,935,466,476	6,427,603,966	6,304,168,657
5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,481,763,692	7,517,066,023	8,104,894,192
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	776,322,450	607,542,300	706,893,450
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	489,806,800	712,694,000	991,302,200
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	706,521,200	798,360,120	769,195,050
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,167,057,785	10,381,279,255	11,564,184,297
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	291,511,125	1,030,221,525	951,200,900
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	255,714,045	308,851,840	549,077,800
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	480,440,820	851,988,950	1,682,613,945
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,294,073,359	35,621,394,749	38,089,727,465
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	146,150,000	103,550,000	67,550,000
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2,181,470,500	2,421,429,600	1,278,618,500
5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai	14,000,000	35,000,000	42,000,000
5.2.3	Belanja Modal	12,297,357,852	16,625,228,213	19,394,347,187

KODE	URAIAN	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan tanah (kantor)	4,001,800		
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	2,579,820,100	4,864,082,250	1,398,760,000
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	297,955,500	247,720,000	3,814,084,000
5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	46,464,000	99,000,000	-
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	281,118,730	255,970,910	340,747,550
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,129,208,035	1,286,512,895	2,539,810,364
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,081,073,867	3,822,976,433	3,016,133,614
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,028,233,700	2,584,913,655	2,145,486,429
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	58,086,900	306,799,560	263,735,000
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	345,665,080	443,068,610	710,857,360
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	825,856,350	822,415,000	1,440,717,325
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	227,697,660	419,257,900	376,071,295
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	124,190,000	170,164,300	200,062,500
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	1,218,434,100	1,265,415,700	3,059,366,750
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	49,552,030	36,931,000	88,515,000

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013-2015

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Selanjutnya disajikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	BELANJA	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN)	PERSENTASE
		(UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR)		
		(a)	(b)	(a) / (b) X 100%
1	Tahun Anggaran 2013	752,430,525,680	1,038,432,098,890	72.5 %
2	Tahun Anggaran 2014	834,548,852,059	1,203,401,576,766	69.3 %
3	Tahun Anggaran 2015	854,458,936,619	1,409,408,278,765	60.6 %

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2013 persentasenya sebesar 72,5% dan tahun 2015 persentasenya menurun menjadi sebesar 60,6%.

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih kecil dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada waktu yang akan datang perlu efisiensi dalam penganggaran belanjanya. Sehingga proporsi belanja pembangunan dan belanja aparatur dapat seimbang.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, maka pemerintah Kabupaten Pacitan harus memanfaatkannya untuk penambahan program prioritas dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Gambaran defisit riil anggaran periode dan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.9
Defisit Riil Anggaran Periode Tahun 2013-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)		
		2013	2014	2015
1	Pendapatan Daerah	1,061,397,988,848	1,260,505,396,064	1,426,596,968,333
2	Belanja Daerah	1,036,980,098,890	1,202,651,576,766	1,408,458,278,765
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,452,000,000	750,000,000	950,000,000
A.	Defisit Riil	22,965,889,958	57,103,819,298	17,188,689,567
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :				
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	48,439,392,447	71,734,182,405	129,225,801,703
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	328,900,000	387,800,000	-
B.	Total Realisasi Penerimaan	48,768,292,447	72,121,982,405	129,225,801,703
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		71,734,182,405	129,225,801,703	146,414,491,271

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2013-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	2013	2014	2015	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Jumlah SiLPA	71,734,182,405	129,225,801,703	146,414,491,271	13.3
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-
SiLPA riil (1-2-3)		71,734,182,405	129,225,801,703	146,414,491,271	13.30

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2013-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
I.	BELANJA	726,548,610,103	804,462,864,519	919,886,549,174	12.54
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	688,472,776,767	767,155,357,953	877,364,429,297	12.90
1	Gaji Dan Tunjangan	598,354,363,747	660,141,808,843	667,145,897,867	5.69
2	Tambahan Penghasilan PNS	5,315,862,500	4,287,350,000	4,693,175,000	-4.94
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2,268,000,000	2,184,000,000	2,402,280,000	3.15
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	856,951,920	899,205,110	931,626,100	4.27
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	81,677,598,600	99,642,994,000	202,191,450,330	62.46
B.	BELANJA LANGSUNG	38,075,833,336	37,307,506,566	42,522,119,877	5.98
1	Honorarium PNS	14,382,271,000	16,298,827,500	19,497,018,800	16.47
2	Honorarium Non PNS	6,686,349,500	2,535,562,000	3,273,690,450	-16.48
3	Belanja Jasa Kantor	8,952,945,910	9,823,366,680	10,912,301,270	10.40
	Belanja telepon	971,220,319	949,729,113	998,122,558	1.44
	Belanja air	136,311,803	137,022,122	204,447,926	24.86
	Belanja listrik	7,664,706,139	8,542,387,904	9,478,588,049	11.21
	Belanja kawat/faksimili/internet	180,707,649	194,227,541	231,142,737	13.24

NO	URAIAN	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,935,466,476	6,427,603,966	6,304,168,657	3.19
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	776,322,450	607,542,300	706,893,450	-2.69
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	489,806,800	712,694,000	991,302,200	42.30
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	706,521,200	798,360,120	769,195,050	4.67
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	146,150,000	103,550,000	67,550,000	-31.96
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,452,000,000	750,000,000	950,000,000	-10.84
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	720,000,000	750,000,000	950,000,000	15.42
	Dana Bergulir	732,000,000			-50.00
2	Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
	JUMLAH (I + II)	728,000,610,103	805,212,864,519	920,836,549,174	12.48

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar pada komponen gaji dan tunjangan PNS, hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi data masa lalu dikutip dari RPJMD Perubahan Kabupaten Pacitan 2011- 2016 yaitu realisasi dan proyeksi pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 10,86% per tahun sebagaimana pada Tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Dalam RPJMD 2011-2016

URAIAN	REALISASI 2011	REALISASI 2012	P-APBD 2013	PERTUMBUHAN	PROYEKSI 2014	PROYEKSI 2015	PROYEKSI 2016
PENDAPATAN ASLI DAERAH	48,359,915	57,298,239	59,955,764	9,26	67,334,101	76,556,573	82,483,608
Pajak Daerah	6,006,625	7,954,645	8,230,500	16,23	14,866,500	17,576,663	20,780,889
Retribusi Daerah	11,626,055	14,058,542	16,602,154	10,55	17,133,828	19,601,086	22,541,249
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,903,227,	3,139,175	2,235,917	-0,14	4,354,910	4,572,656	4,801,288
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27,824,006	32,145,876	32,887,192	7,78	30,978,863	34,806,169	34,360,182
DANA PERIMBANGAN	583,216,975	703,480,864	755,833,057	10,35	807,131,276	899,916,896	978,134,647
Bagian Hasil Pajak dan Bukan Pajak	48,580,538	61,926,220	56,602,134	13,69	54,518,392	62,696,151	65,830,958
Dana Alokasi Umum	480,580,537	589,829,914	647,293,403	11,42	700,743,024	784,832,187	859,391,245
Dana Alokasi Khusus	54,055,900	51,724,730	51,937,520	-2,15	51,869,860	52,388,559	52,912,444
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	226,660,054	197,898,434	236,111,734	13,69	247,412,234	251,575,030	255,813,816
Hibah	986,005	842,483	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	29,581,537	27,659,934	36,729,718	-3,08	37,167,595	37,725,109	38,290,986
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	175,238,937	145,874,996	172,511,571	-8,29	180,137,150	182,839,207	185,581,795
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20,853,574	23,521,020	26,870,445	6,47	30,107,489	31,010,714	31,941,035
PENDAPATAN DAERAH	858,236,946	958,677,537	1,051,900,556	10,86	1,121,877,611	1,228,048,500	1,316,432,071

Sumber: RPJMD Perubahan Kab.Pacitan 2011- 2016

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 terjadi pengurangan pendapatan karena adanya pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, diantaranya penarikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah yang merupakan bagian urusan pendidikan menjadi kewenangan provinsi, urusan pertambangan dan urusan kehutanan sehingga mengakibatkan penurunan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun proyeksi pendapatan daerah 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagaimana Tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017-2021
Kabupaten Pacitan

KODE REKENING					URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
						2017	2018	2019	2020	2021
4					PENDAPATAN DAERAH	1.575.856.624.605	1.671.863.194.083	1.763.146.790.925	1.850.295.277.746	1.937.095.670.527
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	137.620.203.065	147.830.084.784	160.067.836.606	171.569.157.809	185.388.736.104
4	1	1			Hasil Pajak Daerah	25.610.000.000	27.313.000.000	28.056.000.000	28.843.000.000	29.673.000.000
4	1	1	1		Pajak Hotel	350.000.000	360.000.000	370.000.000	380.000.000	400.000.000
4	1	1	2		Pajak Restoran	1.055.000.000	1.070.000.000	1.085.000.000	1.105.000.000	1.120.000.000
4	1	1	3		Pajak Hiburan	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	75.000.000
4	1	1	4		Pajak Reklame	450.000.000	460.000.000	470.000.000	480.000.000	500.000.000
4	1	1	5		Pajak Penerangan Jalan	8.160.000.000	8.300.000.000	8.460.000.000	8.640.000.000	8.840.000.000
4	1	1	6		Pajak Parkir	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	25.000.000
4	1	1	7		Pajak Air Tanah	50.000.000	52.000.000	54.000.000	55.000.000	58.000.000
4	1	1	8		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000	620.000.000	630.000.000	640.000.000	650.000.000
4	1	1	9		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.025.000.000	15.500.000.000	16.000.000.000	16.500.000.000	17.000.000.000
4	1	1	10		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	850.000.000	875.000.000	905.000.000	955.000.000	1.005.000.000
4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	24.207.802.959	25.958.066.322	29.526.061.966	32.247.004.162	37.198.277.445
4	1	2	1		Retribusi Jasa Umum	11.525.122.270	11.946.622.625	12.383.024.381	12.847.221.225	13.335.102.911
4	1	2	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.777.034.770	7.118.035.125	7.473.936.881	7.847.633.725	8.240.015.411
4	1	2	1	2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	38.420.000	38.920.000	39.420.000	39.920.000	40.420.000
4	1	2	1	3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.722.537.500	1.772.537.500	1.822.537.500	1.872.537.500	1.922.537.500
4	1	2	1	4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.150.000.000	2.175.000.000	2.200.000.000	2.235.000.000	2.275.000.000
4	1	2	1	5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	435.000.000	440.000.000	445.000.000	450.000.000	455.000.000

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

KODE REKENING					URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
						2017	2018	2019	2020	2021
4	1	2	1	6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
4	1	2	1	7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
4	1	2	2		Retribusi Jasa Usaha	11.734.685.689	13.043.068.747	16.149.278.886	18.380.636.651	22.818.636.785
4	1	2	2	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	789.515.000	81.664.337	777.553.537	770.500.300	772.082.581
4	1	2	2	2	Retribusi Tempat Pelelangan	720.720.189	727.779.827	727.779.827	734.909.425	742.110.319
4	1	2	2	3	Retribusi Terminal	144.330.500	145.330.500	146.330.500	147.330.500	148.330.500
4	1	2	2	4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	9.200.000	9.292.000	9.384.920	9.478.769	9.573.556
4	1	2	2	5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	18.000.000	18.485.886	19.110.000	19.500.000	20.490.000
4	1	2	2	6	Retribusi Rumah Potong Hewan	17.220.000	17.836.197	17.895.102	17.017.657	17.169.829
4	1	2	2	7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.035.700.000	12.042.680.000	14.451.225.000	16.681.900.000	21.108.880.000
4	1	2	3		Retribusi Perizinan Tertentu	947.995.000	968.374.950	993.758.699	1.019.146.286	1.044.537.749
4	1	2	3	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	355.000.000	375.000.000	400.000.000	425.000.000	450.000.000
4	1	2	3	2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
4	1	2	3	3	Retribusi Izin Gangguan	510.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000
4	1	2	3	4	Retribusi Izin Trayek	37.995.000	38.374.950	38.758.699	39.146.286	39.537.749
4	1	3			Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.482.060.653	2.482.060.653	2.559.693.941	2.631.543.914	2.672.293.441
4	1	3	1		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.482.060.653	2.482.060.653	2.559.693.941	2.631.543.914	2.672.293.441
4	1	3	1	1	Bank Pembangunan Daerah	2.301.371.653	2.301.371.653	2.379.004.941	2.450.854.914	2.491.604.441
4	1	3	1	2	Bank Perkreditan Rakyat	180.689.000	180.689.000	180.689.000	180.689.000	180.689.000

**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN**

KODE REKENING					URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
						2017	2018	2019	2020	2021
4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	85.320.339.453	92.076.957.809	99.926.080.699	107.847.609.733	115.845.165.218
4	1	4	1		Jasa Giro	1.203.582.725	1.263.761.861	1.326.949.954	1.393.297.451	1.462.962.323
4	1	4	2		Pendapatan Bunga Deposito	10.079.867.602	10.583.860.982	11.113.054.031	11.668.706.732	12.252.142.068
4	1	4	3		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000	501.000.000	502.000.000	503.000.000	504.000.000
4	1	4	4		Pendapatan dari BLUD	57.200.000.000	62.600.000.000	69.000.000.000	75.400.000.000	81.800.000.000
4	1	4	5		Pendapatan Lain-lain	35.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
4	1	4	6		Pendaptan JKN	16.301.889.126	17.114.834.966	17.970.576.714	18.869.105.550	19.812.560.827
4	2				DANA PERIMBANGAN	1.122.061.900.183	1.176.565.730.536	1.235.640.267.417	1.297.659.101.835	1.361.086.182.459
4	2	1			Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.596.542.451	56.621.542.451	57.364.449.641	56.631.735.414	57.559.817.487
4	2	1	1		Bagi Hasil Pajak	32.489.746.743	32.489.746.743	32.912.008.989	32.330.844.956	33.305.586.856
4	2	1	1	1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	10.101.150.201	10.101.150.201	9.929.298.980	9.815.399.845	9.986.749.806
4	2	1	1	2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	11.000.258.647	11.000.258.647	11.600.238.379	11.263.170.324	11.965.981.499
4	2	1	1	3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	11.388.337.895	11.388.337.895	11.382.471.630	11.252.274.787	11.352.855.551
4	2	1	2		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	24.106.795.708	24.131.795.708	24.452.440.652	24.300.890.458	24.254.230.631
4	2	1	2	1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	265.218.663	265.218.663	250.313.018	269.905.070	262.663.853
4	2	1	2	2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	62.741.422	62.741.422	66.144.608	52.854.132	61.120.396
4	2	1	2	3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	160.617.920	160.617.920	98.105.405	114.729.851	133.517.774
4	2	1	2	4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	476.810.887	476.810.887	500.218.006	449.456.466	475.824.061
4	2	1	2	5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	21.861.405.549	21.861.405.549	22.255.811.107	21.938.668.605	21.979.322.703
4	2	1	2	6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.257.280.267	1.282.280.267	1.259.127.508	1.452.555.334	1.319.060.844

**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN**

KODE REKENING					URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
						2017	2018	2019	2020	2021
4	2	1	2	7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	22.721.000	22.721.000	22.721.000	22.721.000	22.721.000
4	2	2			Dana Alokasi Umum	750.855.591.580	787.789.921.523	827.113.985.529	869.255.881.306	909.390.397.821
4	2	2	1		Dana Alokasi Umum	750.855.591.580	787.789.921.523	827.113.985.529	869.255.881.306	909.390.397.821
4	2	3			Dana Alokasi Khusus	314.609.766.152	332.154.266.562	351.161.832.247	371.771.485.115	394.135.967.151
4	2	3	1		DAK FISIK	136.593.702.000	150.253.072.200	165.278.379.420	181.806.217.362	199.986.839.098
4	2	3	1	1	Reguler	91.498.190.000	100.648.009.000	110.712.809.900	121.784.090.890	133.962.499.979
4	2	3	1	2	IPD	45.095.512.000	49.605.063.200	54.565.569.520	60.022.126.472	66.024.339.119
4	2	3	2		DAK NON FISIK	178.016.064.152	181.901.194.362	185.883.452.827	189.965.267.753	194.149.128.053
4	2	3	2	01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	10.992.000.000	10.992.000.000	10.992.000.000	10.992.000.000	10.992.000.000
4	2	3	2	02	Tunjangan Profesi Guru	155.405.208.400	159.290.338.610	163.272.597.075	167.354.412.001	171.538.272.301
4	2	3	2	03	Tambahan Penghasilan Guru	2.309.000.012	2.309.000.012	2.309.000.012	2.309.000.012	2.309.000.012
4	2	3	2	04	Bantuan Operasional Kesehatan	5.568.000.000	5.568.000.000	5.568.000.000	5.568.000.000	5.568.000.000
4	2	3	2	05	Jaminan Persalinan	3.172.455.740	3.172.455.740	3.172.455.740	3.172.455.740	3.172.455.740
4	2	3	2	06	Bantuan Operasional KB	569.400.000	569.400.000	569.400.000	569.400.000	569.400.000
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	316.174.521.357	347.467.378.763	367.438.686.902	381.067.018.102	390.620.751.964
4	3	1			Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
4	3	2			Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-	-	-	-
4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	70.879.971.657	73.207.714.601	75.217.649.379	78.518.898.354	82.821.892.102
4	3	3	1		Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	22.988.095.313	24.137.500.078	25.223.687.581	26.232.635.084	27.150.777.311

**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN**

KODE REKENING					URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
						2017	2018	2019	2020	2021
4	3	3	2		Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.375.820.858	11.489.579.066	11.604.474.856	11.720.519.604	11.837.724.800
4	3	3	3		Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.049.176.308	22.101.635.123	23.096.208.703	24.020.057.051	24.860.759.047
4	3	3	4		Bagi Hasil dari Pajak Air Tanah	242.423.122	254.544.278	265.998.770	276.638.720	286.321.075
4	3	3	5		Bagi Hasil dari Pajak Rokok	15.224.456.056	15.224.456.056	15.027.279.469	16.269.047.895	18.686.309.869
4	3	4			Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	181.654.693.500	209.983.409.400	226.980.638.940	236.329.115.187	240.255.475.210
4	3	4	1		Dana Penyesuaian	40.011.114.000	40.011.114.000	40.011.114.000	40.011.114.000	40.011.114.000
4	3	4	2		Dana Desa	141.643.579.500	169.972.295.400	186.969.524.940	196.318.001.187	200.244.361.210
4	3	5			Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	63.639.856.200	64.276.254.762	65.240.398.583	66.219.004.561	67.543.384.652

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Tahun 2016

b. Proyeksi SiLPA

Proyeksi SiLPA sesuai Tabel 3.14 direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA sebesar minus 6,42%, hal ini diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.14
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan

URAIAN	PROYEKSI				
	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	27.344.361.419	25.914.586.873	25.588.275.922	24.397.099.558	20.846.998.757

c. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), maka dapat diproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan

URAIAN	PROYEKSI				
	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan	1.575.856.624.605	1.671.863.194.083	1.763.146.790.925	1.850.295.277.746	1.937.095.670.527
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	27.344.361.419	25.914.586.873	25.588.275.922	24.397.099.558	20.846.998.757
KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA	1.603.200.986.024	1.697.777.780.956	1.788.735.066.847	1.874.692.377.304	1.957.942.669.284

d. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dianalisis berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat periode tahun sebelumnya. Adapun hasil proyeksi untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat melalui Tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
I	BELANJA	1,013,356,150,113	1,059,604,178,338	1,112,638,910,836	1,158,193,527,482	1,195,135,784,816
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,001,226,995,398	1,047,247,293,724	1,098,918,018,305	1,143,957,222,155	1,180,215,855,873

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Gaji Dan Tunjangan	712,312,043,162	742,430,992,063	772,199,929,250	802,706,690,227	830,143,868,612
2	Tambahan Penghasilan PNS	3,067,336,618	3,357,679,576	3,675,505,346	4,023,415,350	4,404,257,254
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	3,523,615,000	3,610,152,000	3,656,801,000	3,706,463,000	3,748,879,000
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	983,679,735	983,679,735	983,679,735	983,679,735	983,679,735
5	Bagi hasil Kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	4,860,253,146	5,204,000,206	5,571,454,241	6,013,661,780	6,270,192,868
6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1,306,000,000	1,340,150,000	1,372,000,000	1,404,000,000	1,442,400,000
7	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	785,274,834	907,198,347	1,041,280,276	1,212,549,204	1,283,195,663
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa Lainnya	274,388,792,903	289,413,441,797	310,417,368,457	323,906,762,859	331,939,382,741
B	BELANJA LANGSUNG	12,129,154,715	12,356,884,614	13,720,892,531	14,236,305,327	14,919,928,943
1	Belanja Jasa Kantor	12,060,629,715	12,288,359,614	13,652,367,531	14,167,780,327	14,851,403,943
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	68,525,000	68,525,000	68,525,000	68,525,000	68,525,000
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,950,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000
2	Dana Bergulir	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
I + II		1,016,306,150,113	1,062,554,178,338	1,115,588,910,836	1,161,143,527,482	1,198,085,784,816

e. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat melalui Tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3.17
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	1.603.200.986.024	1.697.777.780.956	1.788.735.066.847	1.874.692.377.304	1.957.942.669.284
1	PENDAPATAN	1.575.856.624.605	1.671.863.194.083	1.763.146.790.925	1.850.295.277.746	1.937.095.670.527
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	27.344.361.419	25.914.586.873	25.588.275.922	24.397.099.558	20.846.998.757

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
B	BELANJA DAERAH	1.600.250.986.024	1.694.827.780.956	1.785.785.066.848	1.871.742.377.303	1.954.992.669.284
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.019.162.753.574	1.065.183.051.900	1.116.853.776.481	1.161.892.980.330	1.198.151.614.048
PRIORITAS I		1.001.226.995.398	1.047.247.293.724	1.098.918.018.305	1.143.957.222.154	1.180.215.855.872
a	Gaji Dan Tunjangan	712.312.043.162	742.430.992.063	772.199.929.250	802.706.690.227	830.143.868.612
b	Tambahan Penghasilan PNS	3.067.336.618	3.357.679.576	3.675.505.346	4.023.415.350	4.404.257.254
c	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	3.523.615.000	3.610.152.000	3.656.801.000	3.706.463.000	3.748.879.000
d	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	983.679.735	983.679.735	983.679.735	983.679.735	983.679.735
e	Bagi hasil Kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	4.860.253.146	5.204.000.206	5.571.454.241	6.013.661.780	6.270.192.868
f	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.306.000.000	1.340.150.000	1.372.000.000	1.404.000.000	1.442.400.000
g	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	785.274.834	907.198.347	1.041.280.276	1.212.549.204	1.283.195.663
h	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	274.388.792.903	289.413.441.797	310.417.368.457	323.906.762.859	331.939.382.741
PRIORITAS III		17.935.758.176	17.935.758.176	17.935.758.176	17.935.758.176	17.935.758.176
a	Belanja Hibah	9.599.525.000	9.599.525.000	9.599.525.000	9.599.525.000	9.599.525.000
b	Belanja Bantuan Sosial	6.406.647.816	6.406.647.816	6.406.647.816	6.406.647.816	6.406.647.816
c	Belanja Tidak Terduga	1.929.585.360	1.929.585.360	1.929.585.360	1.929.585.360	1.929.585.360
2	BELANJA LANGSUNG	581.088.232.450	629.644.729.056	668.931.290.367	709.849.396.973	756.841.055.236
PRIORITAS I		12.129.154.715	12.356.884.614	13.720.892.531	14.236.305.327	14.919.928.943
a	Belanja Jasa Kantor	12.060.629.715	12.288.359.614	13.652.367.531	14.167.780.327	14.851.403.943
b	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	68.525.000	68.525.000	68.525.000	68.525.000	68.525.000
PRIORITAS II		568.959.077.735	617.287.844.442	655.210.397.836	695.613.091.646	741.921.126.293
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000
PRIORITAS I		2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000
b	Dana Bergulir	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
SURPLUS (DEFISIT) = A-(B+C)		-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa rencana pengeluaran terbesar dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdapat pada gaji dan tunjangan PNS.

Untuk itu terus diupayakan dan didorong peningkatan belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro sehingga dapat memberikan pemicu atau stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara

berangsur-angsur tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas program (*money follow program*). Selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada:

a. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Belanja Daerah harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatannya disertai dengan tolok ukur dan target kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sebagaimana tugas pokok dan fungsinya serta diharapkan dapat meningkatkan tingkat capaian terhadap indikator sasaran.

d. Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan pada penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses *outcome* program serta keluaran dan hasil kegiatan.

f. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka selanjutnya ditetapkan kebijakan terhadap alokasi kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas sebagai berikut:

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai:

Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai:

Program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan dan prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD yang telah diintegrasikan dengan RPJMN maupun RPJMD Propinsi. Program tersebut harus berdampak langsung pada masyarakat dengan daya ungkit pada capaian visi misi. Di samping itu,

prioritas II juga diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, dialokasikan untuk mendanai:

Prioritas ini untuk mendanai alokasi belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa, belanja tidak terduga serta didalamnya untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah menurut kelompok prioritas dan secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 disajikan pada Tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan

JENIS DANA	PROYEKSI									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
PRIORITAS I	63,39	1.016.306.150.113	62,58	1.062.554.178.338	62,37	1.115.588.910.836	61,94	1.161.143.527.481	61,19	1.198.085.784.815
BELANJA TIDAK LANGSUNG	62,45	1.001.226.995.398	61,68	1.047.247.293.724	61,44	1.098.918.018.305	61,02	1.143.957.222.154	60,28	1.180.215.855.872
BELANJA LANGSUNG	0,76	12.129.154.715	0,73	12.356.884.614	0,77	13.720.892.531	0,76	14.236.305.327	0,76	14.919.928.943
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,18	2.950.000.000	0,17	2.950.000.000	0,16	2.950.000.000	0,16	2.950.000.000	0,15	2.950.000.000
PRIORITAS II	35,49	568.959.077.735	36,36	617.287.844.442	36,63	655.210.397.836	37,11	695.613.091.646	37,89	741.921.126.293
PRIORITAS III	1,12	17.935.758.176	1,06	17.935.758.176	1,00	17.935.758.176	0,96	17.935.758.176	0,92	17.935.758.176
JUMLAH	100	1.603.200.986.024	100	1.697.777.780.956	100	1.788.735.066.848	100	1.874.692.377.303	100	1.957.942.669.284